

Kebekuan Organisasi Harus Dicairkan



Oleh Drs. H.A. Hamdan, M.M.

Berdasarkan PP 8 tahun 2002 bahwa kelembagaan di daerah menganut prinsip ramping struktur kaya fungsi, sehingga tidak aneh bila beberapa instansi harus digabung dalam bentuk organisasi baru, namun untuk mengoptimalkan jalannya organisasi baru dari hasil pusi beberapa instansi tidak semudah membalik telapak tangan, begitu pula yang dialami Kantor Infokom PDE dan Arsip Daerah.

Sudah dua kali adanya penggantian manajemen pada unsur pimpinan, ternyata masih dirasakan kurang enerjik dalam memainkan perannya, baik dalam pengelolaan kehumasan, siaran radio pemerintah daerah, fungsi penerangan/wawar, pengolahan data elektronik ataupun dalam hal pengelolaan arsip daerah. Padahal organisasi ini sangat vital dalam pembentukan citra dan juru bicara pemerintah daerah serta penataan dokumen daerah baik yang berhubungan dengan aspek pemerintahan dan agama, aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya aspek tata ruang infrastruktur yang untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah dalam kerangka membangun Kota Sukabumi yang sejahtera.

Itu semua sangat erat kaitannya dengan Produktifitas dan Kemampuan untuk melakukan produksi, dimana pendapat Stephen R Copey dalam bukunya *The 7 Habits of highly effective people*(1997) efektifitas terletak dalam keseimbangan antara Produksi dengan kapasitas produksi. Untuk itu diperlukan pencairan kebekuan "ice breaking" dalam membangun komitmen pembelajaran.

Untuk membentuk komitmen pembelajaran dalam memainkan fungsi Infokom PDE dan Arsip Daerah diperlukan pemahaman gaya belajar dari masing-masing yang terlibat dalam organisasi dengan menggunakan teori ,dengan harapan semua staf ditata kembali dengan mengkolaborasikan gaya belajar diverger,converger,assimilator dan accomodator dalam sebuah team yang solid, sehingga mampu menganalisis permasalahan yang rumit dan menemukan solusi atau leverage.

Namun setelah dicoba untuk mengkolaborasikan gaya belajar ternyata masih belum bergeliat sesuai dengan kapasitas yang ada, baik ditinjau dari segi kualitas SDM, alat yang tersedia ataupun komitmen pimpinan, hal ini disebabkan adanya Learning disabilities, baik yang disebabkan ego sektoral tanpa mengetahui korelasi dengan bidang lain, disebabkan oleh karyawan yang suka melempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam, ada pula yang

menyelesaikan masalah yang nampak dipermukaan saja dengan bersandar pada masalah lalu, ada juga yang tidak peka terhadap perubahan reformasi paradigma.

Situasi itu harus dilakukan Learning commitment yang mengacu pada nilai-nilai pribadi, norma yang bisa dikontrol bersama sehingga disepakati adanya komitmen pembelajaran demi penyelesaian tugas yang saling mendukung, saling melengkapi serta saling membutuhkan, satu sama lain tidak merasa paling hebat, tapi merupakan keterkaitan yang utuh dalam melakukan pencitraan terhadap pemerintah daerah dalam mencapai visi kota sebagai pusat pelayanan jasa terpadu dibidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam melakukan exercise pembahasan learning commitment ditemukan nilai kejujuran, efisiensi, bertanggung jawab, kreatifitas, dan keadilan, sehingga dirumuskan komitmen pembelajaran “ Kejujuran akan mampu melaksanakan efisiensi biaya yang bisa dipertanggung jawabkan sehingga mendorong kreativitas dan keadilan dalam bertugas.

Setelah komitmen pembelajaran terbangun di Kantor Infokom, PDE dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, diperluakan adanya Pembangunan Organisasi pembelajaran(BLO) yang merujuk pada seni dan praktek disiplin kelima dari mulai persola matery, mental models building shared vision, team learning dan sistem thinking. Hal ini dimaksudkan supaya mampu berpikir sistemik dengan melakukan perubahan dalam pemecahan masalah secara sintomatik ke fundamental. Dengan menemukan leverage yang paling efisien dan efektif.

Masalah yang ada di Infokom PDE dan Arsip daerah sangat kompleks, oleh karena itu memerlukan penanganan yang terintegrasi dengan memberikan kesempatan kepada seluruh stake holders membangkitkan kreativitas untuk menentukan apa yang dikehendaki, melihat kenyataan secara jelas, mengelola tegangan kreatif&emosional sehingga **mampu mendorong orang lain mengembangkan diri untuk mencapai tujuannya.**

Namun harus diingat bahwa setiap orang yang ada di infokom atau yang berhubungan dengan infokom mempunyai latar belakang berbeda, cara pandang berbeda, pengalaman berbeda, persepsi berbeda maka diperlukan mental models agar terjadi keseimbangan antara inquiry dengan advokasi karena menurut Drs. Soehartadji,MA bahwa **REFLECTION Adalah ketrampilan untuk berfikir secara bertahap dan tenang INQUIRY Adalah melakukan usaha mencari penjelasan asumsi orang lain dalam suatu dialog dengan rekan sejawat.**

Infokom sebagai juru bicara pemda harus mampu mengelola tegangan daya kritis masyarakat dengan emosional masa yang cenderung mencibirkan kebijakan pemerintah daerah, disinilah diperlukan creative tension, emosional tension dan sub conscius. Dengan pembentukan persepsi yang sama akan menimbulkan saling menghargai, yaitu para pejabat atau nara sumber tidak akan mempersepsikan negatif terhadap adagium “The bad news is the good news, bahkan pihak wartawan juga tatkala akan memuat berita akan melakukan konfirmasi dan melengkapi data yang akurat.

Disinilah diperlukan adanya building shared vision antara Infokom, Wartawan, Industri Pers, SKPD dan Masyarakat melalui tahapan telling, selling, testing, consulting dan co creating sebagaimana teori yang dikemukakan Peter Senge dengan harapan terjadi intergrasi kepentingan antara pemerintah, masyarakat dan industri pers.

Untuk mengoperasionalkan visi bersama diperlukan team learning, yaitu kelompok orang yang mampu belajar secara degeneratif dan terus menerus untuk meningkatkan kualitas pemberitaan yang seimbang, disini diperlukan tiga dimensi kritis, yaitu berfikir jernih berbagai masalah rumit dalam pemberitaan, berinovasi secara terkoordinasi, saling percaya (operasional trust) dan semua stake holder dibidang publikasi, dokumentasi dan pemberitaan saling memberikan peran.

Dalam hal ini infokom, wartawan/industri pers dan masyarakat harus mempunyai komitmen bahwa informasi itu penting untuk dikomunikasikan dan dipublikasikan melalui media yang sehat, bertanggung jawab sesuai dengan amanah UU nomor 40 tahun 1999 sehingga terbentuk publik trust dalam pencitraan pemerintah daerah yang mengakomodir aspirasi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat termasuk dunia pers.

Untuk itu diperlukan pemimpin dan pimpinan yang memenuhi nilai dan berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai juru bicara, sebagai menentu arah, sebagai pelatih dan sebagai agen perubahan seperti yang dikemukakan dalam teori **Burt Nanus, Visionary Leadership**, karena kepemimpinan itu kemampuan mempengaruhi oranglain untuk mencapai tujuan bersama.

Jelaslah para kepala seksi dan kepala infokom harus melakukan analisis tentang gaya kepemimpinan, apakah berorientasi pada tugas atau berorientasi pada personal atau ada keseimbangan antara keduanya, adakah skala potensi kepemimpinan dari semua seksi dan semua biro surat kabar atau organisasi pers, seperti halnya PWI, APJI, POSKOWASI atau apapun namanya yang mencintai profesi wartawan.

Saat ini perkembangan informasi semakin cepat tanpa batas borderless sangat diperlukan efektifitas kepemimpinan yang kuat dan mampu mewujudkan visi bersama menurut DR Purnaman di era global diperlukan pemimpin transformasional dengan pandangan jauh kedepan untuk melakukan perubahan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal yang relevan dengan cirtra dan karakter bangsa dalam kolidor Good governance sebagai implementasi administrasi publik yang mensinergikan antara government, privat sector dan society dalam mencapai visi kota sebagai pusat pelayanan jasa terpadu dibidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Yang didukung oleh perkembangan dan pemanfaatan ICT

Prof. DR. Bintoro memberikan pemahaman bahwa goodgovernance sama dengan masyarakat pancasila bila semua prinsipnya dijalankan dan dilaksanakan dengan baik, bahkan masyarakat madani yang digulirkan di era reformasi untuk mensejahterakan masyarakat majemuk, demokratis, Hak azasi manusia, penegakan hukum, ekonomi pasar yang berkeadilan dan kesetaraan jender.

Makanya Infokom dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap citra pemerintah daerah memerlukan daya saing dalam mencari, mengolah menyajikan dan menuangkan sebuah pemberitaan, sedangkan untuk mempunyai daya saing dikatakan oleh Dr. Mudrajat Kuncoro harus memahami kondisi eksisting ekonomi makro yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan industri serta pola konsumsi dengan orientasi pengembangan industri tahun 2025 pada industri agro, telematika dan alat angkut.

Sedangkan Prof. DR. Man Suparman, SH, SU menjelaskan bahwa daya saing yang kuat harus memahami hukum baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas ataupun sebagai proses dan fungsi hukum dalam menunjang pembaharuan

masyarakat. Makanya pemberdayaan masyarakat informasi perlu ditata ulang agar saling memberi manfaat, kalaulah saat ini wartawan yang terdaftar itu mencapai 196 dengan jumlah media 93 dan 53 yang aktif menulis itu merupakan potensi yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan bersama untuk menjadi peluang usaha yang berdampak pada kesejahteraan.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.